

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). UU No. 19 Tahun 1965 dalam hal memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum (*volkgemeenschappen*) memiliki hak ada istiadat dan asal usul. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan ini nama, jenis, dan bentuk desa sifatnya tidak seragam.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut kamus Poerwadarminta (1976), adalah “sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun;... 2 dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota);...”. Desa menurut kamus tersebut terutama dalam arti fisik. Lain lagi dengan istilah desa dalam rembug desa, yang berarti fisik, masyarakat dan pemerintahannya. Istilah lain yang memiliki pengertian hampir sama adalah village.

Desa adalah satu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan yang hidup serta menetap di suatu daerah terutama dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu kepala desa (Marbun 1980).

Menurut Bintarto (1987), “Desa merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya agraris.” Menurut pemerintahan adalah suatu wilayah yang diberi hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan dipimpin

oleh seorang kepala desa dan berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Warpani 1984).

Menurut Kartohadikusumo (1953), "Desa ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri." Tempat dimana masih memiliki sistem komunitas yang kuat dan kebanyakan penduduknya adalah petani. Tempat dimana manusia hidup dengan sistem tradisional. Tempat dimana basis ekonomi kebanyakan dihubungkan dengan pertanian.

Menurut Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, wilayah pedesaan mempunyai karakteristik fisik sebagai berikut :

1. Perbandingan antara jumlah manusia dengan luas tanah (*man land ratio*) yang besar
2. Terdapat lapangan kerja agraris
3. Tata guna tanah didominasi oleh sektor pertanian
4. Jenis dan teknik pertanian ditentukan oleh sektor pertanian
5. Masyarakat memiliki tingkat hubungan kekerabatan yang tinggi (akrab)
6. Sifat yang ada masih menurut tradisi (tradisional)

2.1.2 Karakteristik Umum Desa

Secara umum, pedesaan dicirikan dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Secara sosial budaya pedesaan, khususnya desa-desa asli sangat dipengaruhi oleh suatu pola tradisional yang masih kuat, ikatan sosial antar individu maupun antar kelompok yang kuat; pola sosial budaya yang relatif homogen.
2. Secara sosial ekonomis dicirikan dengan kegiatan kerja dan usaha di sektor pertanian; kegiatan ekonomis yang homogen pada suatu sektor tertentu; organisasi perekonomian yang umumnya masih berdasarkan pola tradisional.
3. Secara kelembagaan pemerintahan, sekalipun sudah didasarkan kepada suatu ketentuan dan perundangan formal tetapi sistem kelembagaan tradisional masih umum dianut di pedesaan Indonesia; batas wilayah desa tidak definitif.
4. Secara fisik wilayah pedesaan menampilkan struktur alami yang dominan dibandingkan dengan struktur binaan; wilayah terbangun umumnya tidak masif, dalam luasan yang relatif kecil dan tersebar, pola tata ruang fisik kadang-kadang berdasarkan suatu pola budaya tradisional; jaringan praarana jalan dan utilitas umum alami dan sederhana.

Menurut Soekanto (1990) desa mempunyai karakteristik sosial antara lain:

1. Hubungan kemasyarakatan yang erat dan mendalam
2. Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien
3. Golongan orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting
4. Pengaruh tokoh masyarakat lebih besar daripada penguasa

Karakteristik ekonomi suatu desa, antara lain :

1. Ketergantungan pada kota dalam hal pasar dan modal
2. Lapangan kerja utama di sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian
3. Kegiatan ekonominya adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam
4. Teknologi sederhana/tradisional
5. Skala kecil dan menengah
6. Permasalahan modal dan pemasaran
7. Masih besarnya jumlah penduduk miskin
8. Terbatasnya alternatif lapangan kerja
9. Rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani
10. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja

Dalam kehidupan ekonomi pertanian, wilayah pedesaan memerlukan empat kegiatan ekonomi, yaitu :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang memproduksi hasilnya.
2. Industri yang menghasilkan barang yang digunakan sebagai masukan dalam pertanian.
3. Industri yang menghasilkan barang dari pengolahan hasil pertanian.
4. Penyaluran hasil pertanian dan hasil industri pertanian kepada konsumen.

2.2 Karakteristik Kemiskinan

2.2.1 Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (2000) karakteristik-karakteristik rumah tangga miskin tidak saja dapat dikumpulkan melalui survei tetapi juga melalui pendataan rumah tangga secara lengkap. Terdapat delapan variabel yang layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan, yaitu:

1. luas lantai perkapita (lebih kecil atau lebih besar dari 8m²)
2. jenis lantai (tanah atau bukan tanah)
3. ketersediaan air bersih (tidak terlindung atau terlindung)

4. keberadaan jamban (tidak ada atau ada)
5. kepemilikan asset (tidak punya atau punya)
6. variasi konsumsi lauk pauk (tidak bervariasi dan bervariasi)
7. pembelian pakaian (tidak pernah membeli minimal satu stel pakaian dalam setahun atau pernah)
8. kehadiran dalam kegiatan sosial (tidak pernah hadir atau pernah).

Kedelapan variabel tersebut telah mencakup aspek sosial dan ekonomi penduduk/rumah tangga diantaranya aspek sandang, pangan, perumahan, kepemilikan asset dan aktivitas sosial.

2.2.2 Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga Miskin

Pendidikan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah.

Dengan demikian orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Untuk melihat kecenderungan tersebut, beberapa karakteristik pendidikan seperti rata-rata lamanya sekolah, kemampuan baca tulis, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga miskin menarik untuk dicermati (Badan Pusat Statistik 2008).

2.2.3 Karakteristik Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah sumber penghasilan utama rumah tangga. Sumber penghasilan utama umumnya terkait erat dengan tingkat penghasilan. Misalnya penghasilan atau upah yang bersumber dari pekerjaan di sektor formal cenderung lebih tinggi dibandingkan upah yang bersumber dari pekerjaan di sektor informal.

Dengan demikian rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan utama berasal dari sektor formal akan cenderung lebih sejahtera (dalam arti memiliki penghasilan yang lebih tinggi) dibandingkan dengan rumah tangga yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor informal. Dua karakteristik utama ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin berdasarkan ketersediaan data yang ada adalah lapangan usaha atau sektor dan jumlah jam kerja seminggu (Badan Pusat Statistik 2008).

2.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2000) terdapat dua jenis kemiskinan:

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian tefokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk Relatif miskin.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diberikan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilainya dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan/ pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2.4 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan social serta memiliki kesamaan budaya, wilayah dan identitas. Masyarakat juga dapat di artikan sebagai kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama. Faktor-faktor atau unsur-unsur masyarakat menurut Soekanto (1990), antara lain:

1. Beranggotakan minimal 2 orang
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Karakteristik kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, Roucek dan Warren (1963) mengemukakan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut :

1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).
2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada.
3. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar/banyak.
4. Ciri yang dikemukakan ini tidak berarti ada atau berlaku di setiap desa, tetapi bisa saja salah satu atau beberapa ciri yang sudah tak kelihatan, akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Beberapa ciri masyarakat pedesaan adalah (Soekanto 1990) :

1. Warga masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya.
2. Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien (*subsistence farming*).
3. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting.
4. Apabila ditinjau dari sudut pemerintahan, maka hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi.

2.5 Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Menurut Kementerian Negara Perumahan Rakyat, MBR merupakan keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sampai dengan dua juta rupiah per bulan (Wikipedia 2011).

2.6 Tinjauan Partisipasi

2.6.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu konsep yang tidak bisa dipisahkan dari segala bentuk perencanaan wilayah yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Maksud dari undang-undang tersebut adalah bahwa

otonomi daerah sudah harus menjadi sebuah paradigma dalam perencanaan, karena membawa aspirasi dari masing-masing daerah yang merupakan bentuk dari *bottom up planning*. Untuk lebih memahami mengenai pengertian dari partisipasi, maka akan dijabarkan beberapa definisi dari partisipasi sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah suatu perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
2. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan berada pada urutan yang tinggi dalam agenda desentralisasi, seperti diamanatkan oleh UU No. 18/1997 jo UU No. 34/2000, UU No. 22/1999, UU No. 41/1999, UU No. 10/2004. Ini berarti bahwa undang-undang harus menjamin partisipasi masyarakat. Hasil-hasil positif yang diharapkan terjadi antara lain (Sudirman 2005):
 - Peraturan daerah didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berbagai peraturan akan lebih sesuai dengan kenyataan, dan lebih mungkin memenuhi harapan-harapan masyarakat lokal.
 - Mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi peraturan dan bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang pembuatannya melibatkan mereka secara aktif.
 - Memberdayakan pemerintah daerah untuk mendemokratisasi proses pembuatan kebijakan, dan menjadi lebih bertanggung gugat kepada pemilih mereka. Konsultasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, seperti universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum, memungkinkan “pengawasan dan keseimbangan” menjadi bagian dalam proses.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pembuatan kebijakan, dengan tujuan agar masyarakat merasa memiliki, bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat serta untuk menghindarkan kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.

2.6.2 Tahapan Partisipasi

Partisipasi dapat berarti mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan. Tahapan partisipasi dapat dikelompokkan pada beberapa tingkatan (Agung 2004), antara lain:

1. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*legitimation Participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

2.6.3 Proses Kegiatan Partisipatif

Kegiatan partisipatif yaitu kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai subyek sedangkan pihak luar berperan sebagai fasilitator. Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan partisipatif tentunya melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap untuk melakukan kegiatan partisipatif ini yaitu:

A. Proses Sosialisasi Kegiatan

Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses tahapan perencanaan partisipatif yang akan dilakukan di wilayah studi. Hasil yang diharapkan dalam proses ini yaitu masyarakat dan pemerintah setempat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai proses kegiatan partisipatif yang akan dilaksanakan.

B. Rapat Kesiapan Masyarakat

Rapat kesiapan masyarakat yaitu rapat yang dilakukan dengan warga, mengundang warga secara terbuka dan diselenggarakan oleh tim fasilitator. Hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu pernyataan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya.

C. Fokus Group Discussion (FGD)

Fokus Group Discussion (FGD) dapat memberikan data atau informasi yang berbeda dengan apa yang telah diperoleh dari wawancara satu persatu. Data yang diperoleh dapat merupakan jenis data tersendiri atau bersikap melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Menurut Kitchin dan Tate (2000) dalam Yunus (2010), anggota *fokus group discussion* (FGD) disarankan terdiri antara 3 sampai 10 orang.

Sementara itu menurut Longhurst (2003) dalam Yunus (2010), jumlah kelompok ideal sebuah *fokus group discussion* (FGD) yaitu antara 6 sampai 12 orang. Pelaksanaan diskusi dipandu oleh seorang moderator atau fasilitator yang menghidupkan diskusi dan mengarahkan materi pembicaraan supaya tidak melenceng dari topik yang dibahas. Anggota kelompok diskusi seharusnya dipilih atas dasar kesamaan latar belakang tertentu dan memiliki kesamaan karakteristik.

D. Participatory Rural Appraisal (PRA)

PRA merupakan metode partisipatif dalam bekerja dan berperan bersama masyarakat. PRA pada umumnya diterapkan pada masyarakat pedesaan. Latar belakang dari metode ini adalah seringnya suatu program tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh minimnya aspirasi masyarakat dalam program tersebut. Prinsip-Prinsip Penerapan PRA (Mikkelsen 2011):

1. Masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek
2. Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai *insider* bukan *outsider*
3. Masyarakat bertindak dalam membuat peta, model, diagram, pengurutan, member angka/nilai, mengkaji/menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi, menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi.
4. Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indicator sosial.

2.6.4 Analisis Partisipatif

A. Analisis Kondisi Fisik Desa

Analisis kondisi fisik desa ini dengan menggunakan teknik PRA serta observasi lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi eksisting serta potensi dan masalah yang ada di wilayah studi. Adapun alat-alat analisis PRA yang digunakan yaitu (Adimiharja 2003):

1. Pemetaan Desa

Pemetaan adalah teknik PRA yang digunakan untuk asumsi diskusi mengenai keadaan wilayah desa tersebut. Keadaan-keadaan tersebut digambarkan kedalam bentuk peta. Jenis informasi yang dikaji yaitu peta sumber data umum dan peta sumber daya alam desa.

2. **Transek Desa**

Teknik penelusuran lokasi (transek) adalah teknik PRA untuk membuktikan pengamatan langsung lingkungan dan sumberdaya masyarakat dengan cara menyusuri wilayah desa mengikuti lintasan tertentu yang telah disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut. Jenis-jenis transek terdiri dari transek sumber daya desa dan transek berdasarkan musiman.

B. **Analisis Kondisi Non Fisik Desa**

Analisis kondisi non fisik desa ini dengan menggunakan teknik PRA serta observasi lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi eksisting serta potensi dan masalah yang ada di wilayah studi. Adapun alat-alat analisis PRA yang digunakan yaitu (Adimiharja 2003):

1. **Diagram Aktivitas**

Teknik ini memperlihatkan kegiatan sebuah keluarga, termasuk laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Kegiatan ini untuk mengetahui pola hidup dan penggunaan waktu sehari-hari keluarga. Selain itu teknik ini juga bisa digunakan untuk melakukan pemilahan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

2. **Kajian mata pencaharian**

Teknik kajian mata pencaharian adalah teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai berbagai aspek mata pencaharian masyarakat. Jenis-jenis mata pencaharian beserta aspek-aspeknya digambarkan dalam sebuah bagan. Informasi yang dikaji yaitu jenis-jenis kegiatan atau keterampilan masyarakat yang bisa/telah menjadi sumber mata pencaharian.

3. **Kalender Pendapatan**

Teknik kalender pendapatan adalah teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai pendapatan yang diperoleh masyarakat dari mata pencaharian dominan yang ada di wilayah studi. Dalam kalender pendapatan ini akan diketahui kapan masyarakat mendapatkan pendapatan terbesar.

4. **Analisis Kelembagaan**

Analisis kelembagaan yaitu analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut. Dari hasil analisis kelembagaan ini juga dapat diketahui hubungan diantara lembaga-lembaga yang ada sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang ada dalam lembaga-lembaga tersebut. Selain itu dari hasil analisis kelembagaan ini dapat diketahui hubungan atau keterkaitan antara

lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat setempat. Analisis kelembagaan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kelembagaan formal dan kelembagaan non formal.

C. Analisis Akar Masalah

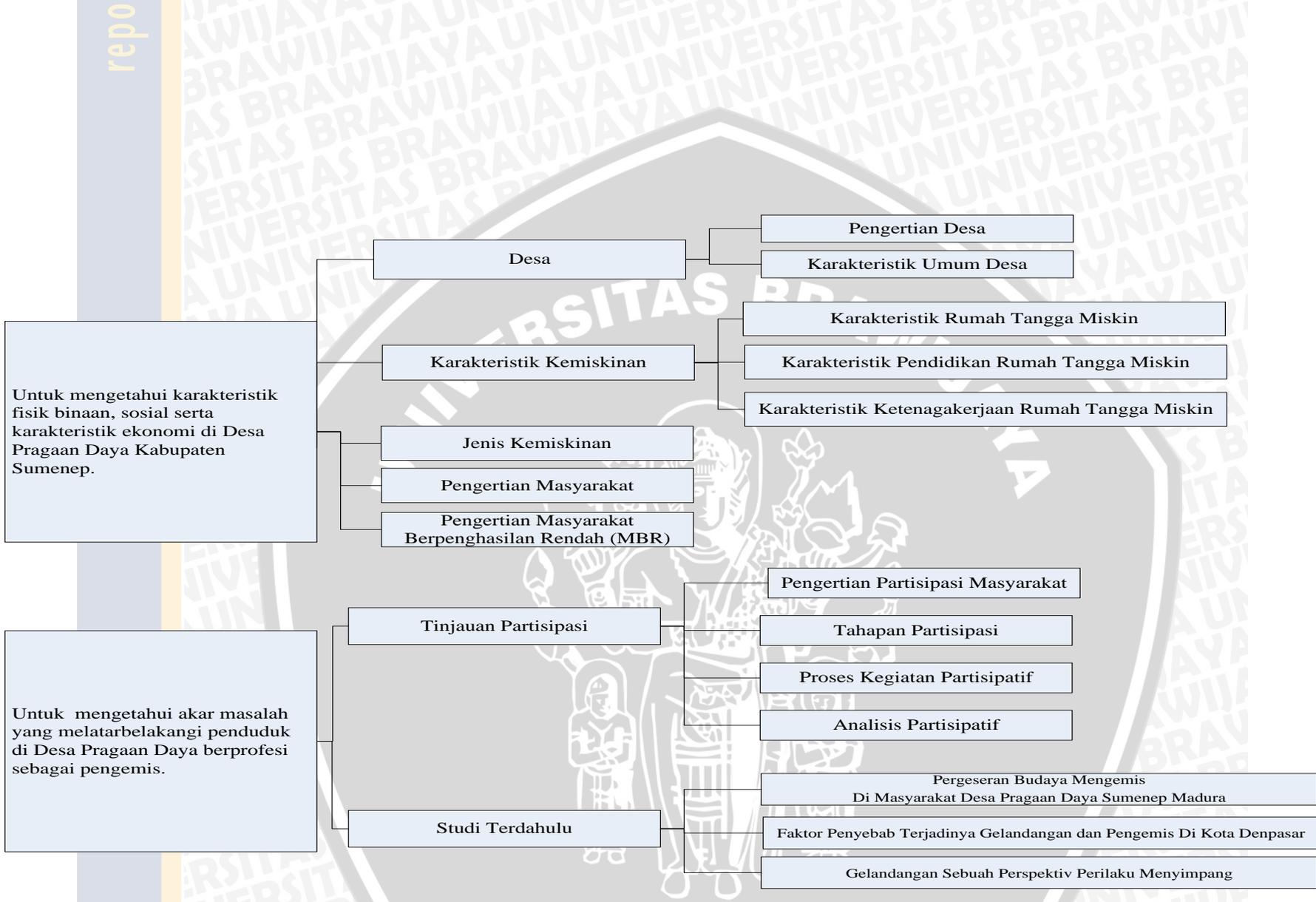
Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam hal memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa secara pintas. Teknik Analisa Akar Masalah dapat melibatkan orang setempat yang tahu secara mendalam masalah yang ada. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan teknik ini yaitu: 1)Mengidentifikasi masalah utama (yang perlu dipecahkan); 2)Mengidentifikasi penyebab masalah tersebut (curah pendapat); 3)Mengelompokkan sebab-sebab tersebut; 4)Mengidentifikasi tingkatan penyebab (I, II dan III); 5)Menentukan tujuan dan harapan (keluaran); 6)Memprioritaskan penyebab yang paling mendesak; 7)Memprioritaskan harapan yang paling efektif, mudah dan realistis untuk dicapai; 8)Menyusun rencana kegiatan (5W + 1H).



Tabel 2.1 Tinjauan Studi Terdahulu

No.	Sumber	Judul	Lokasi	Variabel	Metode	Tujuan
1.	Ali Al Humaidy	Pergeseran Budaya Mengemis Di Masyarakat Desa Pragaan Daya Sumenep Madura	Desa Pragaan Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya/Tradisi Mengemis • Strategi mengemis • Jaringan Pengemis 	<p>Analitis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>) kepada para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintah mulai dari level aparat desa sampai kabupaten, para pemerhati sosial khususnya yang pernah melakukan penelitian sejenis, dan pengemis sebagai aktor</p> <p>Analisis Deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi mengemis, • Mengetahui proses internalisasi dan sosialisasi terhadap generasi mereka, • Mengetahui strategi mengemis
2.	Gede Sedana	Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis	Kota Denpasar	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan individu dan keluarga; • umur; • rendahnya tingkat pendidikan formal; • ijin orang tua; • rendahnya tingkat ketrampilan (“life skill”) untuk kegiatan produktif; • sikap mental; <p>Faktor eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi hidrologis; • kondisi pertanian; • kondisi prasarana dan sarana fisik; • akses terhadap informasi dan modal usaha; 	Analisis Deskriptif	Mengidentifikasi berbagai masalah atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai pengemis baik yang ditemui di daerah asal maupun di daerah tujuan (kota-kota).

No.	Sumber	Judul	Lokasi	Variabel	Metode	Tujuan
3.	Dino	Gelandangan Sebuah Perspektiv Perilaku Menyimpang	Kota Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi permisif masyarakat di kota; • kelemahan penanganan Gepeng di kota. <p>Faktor internal meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • faktor sifat malas, • tidak mau bekerja, • mental yang tidak kuat, • adanya cacat fisik dan adanya cacat psikis (kejiwaan). <p>faktor ekstern terdiri dari ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • faktor ekonomi, • geografi, • sosial, • pendidikan, psikologis, kultural, • lingkungan dan agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Deskriptiv • Analisis Development 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui penyebab munculnya gelandangan. • Mengatahuai Penyimpangan yang terjadi pada fenomena gelandangan. • Mengetahui langkah-langkah preventif untuk memecahkan masalah gelandangan.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Contents

2.1	Desa.....	10
2.1.1	Pengertian Desa.....	10
2.1.2	Karakteristik Umum Desa.....	11
2.2	Karakteristik Kemiskinan.....	12
2.3	Jenis-Jenis Kemiskinan.....	14
2.4	Pengertian Masyarakat.....	14
2.5	Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).....	15
2.6	Tinjauan Partisipasi.....	15
2.6.1	Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	15
2.6.2	Tahapan Partisipasi.....	17
2.6.3	Proses Kegiatan Partisipatif.....	17
2.6.4	Analisis Partisipatif.....	18
4.	Analisis Kelembagaan.....	19
	Tabel 2.1 Tinjauan Studi Terdahulu.....	21

